BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di desa Oeltua kecamatan Taebenu kabupaten Kupang telah berjalan dengan baik. Seluruh rangkaian atau proses kegiatan mulai dari penetapan calon, sosialisasi awal, pelaksanaan program,monitoring program semua berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan penelitian di desa Oeltua peneliti menyatakan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Oeltua Kecamatan Taebenu kabupaten Kupang untuk mengubah pola pikir masyarakat desa, yang semula mereka yang tidak memperhatikan pendidikan dan kesehatan anak, dengan adanya program keluarga harapan keluarga penerima bantuan tersebut sudah mulai sadar dan aktif akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak mereka guna menatap masa depan yang lebih baik.

Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat didukung oleh efektifitas organisasi pelaksanaan dalam member pembelajaran, pendampingan, dan kemandirian bagi masyarakat miskin. Secara lengkap kesimpulan dari penelitian dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang dapat dinyatakan telah tepat sasaran dan tujuan dari pelaksanaan PKH telah tercapai dengan baik mulai dengan mekanisme, dan prosedur, kesesuaian jumlah bantuan yang

diterima oleh peserta telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedomaan umum pelaksanaan PKH. Begitu juga dengan manfaat dana PKH yang sudah meringankan beban para peserta PKH baik dibidang pendidikan maupun kesehatan serta kesejahteraan sosial. Akan tetapi masih banyak masyarakat di desa Oeltua yang memiliki kondisi yang sama dengan KPM namun tidak mendapatkan bantua tersebut.

2. Sumber daya dalam pelaksanaan PKH di desa Oeltua dianggap sudah sangat baik dalam menjalankan tugas, selain itu mereka juga mendapat pelatihan dari kementrian sosial RI, terkait pelaksanaan PKH tersebut.
3. Komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan baik dan juga lancar, ini dilihat dari dengan adanya pembagian struktur organisasi dan pembagian tugas yang cukup baik ddan memilih pertemuan secara formal yang dilakukan sesering mungkin.
4. Karateristik agen pelaksana atau pendamping KPM juga merasa benar-benar memberdayakan diri mereka sendiri sebagai obyek dan pelaksana pembangunan serta memberikan motivasi kepada para peserta KPM.
5. Kondisi sosial ekonomi di desa Oeltua masih banyak masyarakat desa atau KPM yang memiliki kondisi sosial atau ekonoomi yang memprihatinkan, itu disebapkan oleh tingkat pendidikan, skill, kesadaran masyarakat atas pendidikan dan kesehatan masih rendah, akan tetapi dengan adanya program PKH ini KPM telah melaksanakan sesuai kewajiban di dalam PKH yang salah satu kewajiban untuk KPM yang mempunyai balita dan anak usia sekolah berkewajiban untuk periksakan dua minggu ke

posyandu atau puskesmas terdekat, dan bagi KPM yang mempunyai anak usia sekolah berkewajiban untuk didaftarkan dan disekolahkan, dan juga daftar kehadiran disekolah akan di cek sekurang-kurangya kehadiran di atas 85 persen.

6.2 Saran

Berdasarkan dari hasilpenelitian yang dilakukam oleh peneliti, sehubungan dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Oeltua, peneliti selayang memerikan beberapa masukan, yaitu sebagai berikut:

1. PKH di desa Oeltua kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang telah tepat sasaran dan tujuan akan tetai perlu adanya pedataan ulang oleh BPS untuk menambahkan kuota penerima PKH karena masih banyak warga masyarakat di desa Oeltua termasuk rumah tangga sangat miskin atau memiliki kondisi yang sama dengan KPM.
2. Dalam pelaksanaan PKH di desa Oeltua sudah cukup baik namun lebih baik lagi jika ada penambahan pendamping yang dilakuakan, agar dapat membantu pelaksanaan PKH agar lebih maksimal.
3. Diharapkan kepada peserta PKH yang mendapat bantuan bantuan ini terutama didesa Oeltua agar harus menggunaka dana tersebut dengan sebaik-baiknya, jangan malah disalah gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugigan para peserta KPM itu sendiri, yang dimana seharusnya dana yang mereka terima harus dipergunakan untuk kebutuhan

pendidikan dan kesehatan agar cita-cita dan tujuan PKH dapat terealisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan,* (Ed. Revisi, 2013:19).

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Pendamping Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi 2012).

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan,*

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*(Ed. Revisi 2013).

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan*, 2013.

Khomsan, Ali, dkk. 2015, *Indikator kemiskinan dan klasifikasi orang miskin,* Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia.

Kemensos RI. 2015. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Kementrian Sosial. Jakarta

Nata irawan, 2014. *Tata kelolah pemerintah desa era UU Desa.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Purwanto, Agus, Erwan dan Dyah Ratih Suliryastuti, 2012. *Implementasi kebijakan publik : Konsep dan aplikasi di Indonesia.* Yogyakarta: Gava Media.

Sugiyono, 2011. *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabet

Sugiyono, 2014. *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&B*. Bandung : CV Alfabet.

Suharto,Edi, 2013. *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat,* Bandung: Refika Aditama.

Widodo, Joko, 2006. *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik.* Sidoarjo: Bayumedia Publishing.

Jurnal

Adrianus Meliala, *Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respon Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya*" (Edisi 8, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Desember 2012:9).

Nurwati, Nunung, *Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan.* Padjajaran : Jurnal Kependudukan Padjajaran Vol. 10.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 *Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 *Tentang Penanganan Fakir Miskin*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Penyandang Disabilitas*

PMK No.228/PMK.05/2016 Tentang perubahan atas PMK No.254/PMK.05/2015 *Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementrian Negara/Lembaga*

Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 *Tentang Penyaluran Bantuan sosial Non Tunai* SK Dirjen Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 *Tentang Pedomaan Umum PKH.*